



Implementasi E-Procurement dan Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa



Implementasi E-Procurement dan Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa

Implementasi E-Procurement dan Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa



Johan Arifin, SE, M.Si, Ph.D, C.FrA. adalah dosen tetap pada jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (FBE UII). Pada saat ini ia menjabat sebagai ketua Jurusan Akuntansi FEB UII. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi (S1) di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1994. Selanjutnya, pendidikan S2 diselesaikannya di Universitas Gadjahmada pada tahun 2001 dengan mengambil konsentrasi Akuntansi Sektor Publik, dan pendidikan S3 pada bidang Akuntansi Sektor Publik diselesaikannya di Curtin University pada tahun 2015. Selanjutnya pendidikan tambahan diikutinya yaitu sertifikasi auditor forensik (CFrA) pada tahun 2017 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF). Terdapat beberapa matakuliah saat ini yang diampunya meliputi Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Pemerintahan, Pengantar Akuntansi Forensik, Sistem Pengendalian Manajemen dan Corporate Governance. Selain mengajar, saat ini ia juga aktif melakukan penelitian, terutama pada bidang Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Forensik. Sebelum menerbitkan buku ini, ia juga telah menerbitkan dua. Buku pertamanya diterbitkan pada tahun 2017 dengan judul Akuntansi Sektor Publik, kemudian buku keduanya diterbitkan hampir bersamaan waktunya dengan buku ini yaitu tahun 2020 dengan judul Fraud, Mendeteksi dan Mengatasinya (Pendekatan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif).



Dekar Urumsah, M.Com (IS), Ph.D., C.Fr.A. adalah dosen tetap pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (FBE UII). Pada saat ini mengemban amanah sebagai ketua Program Studi Magister Akuntansi FBE UII. Ia telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E.) jurusan Akuntansi (S1) di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1992 dan juga menyelesaikan Sarjana Sains (S.Si) Elektronika Instrumentasi, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997. Pendidikan S2 diselesaikan di Curtin University pada tahun 2004 dengan mengambil bidang Sistem Informasi dan pendidikan S3 pada bidang Manajemen Informasi diselesaikan di Curtin University tahun 2014. Sertifikasi Auditor Forensik diperoleh pada 2018. Dekar Urumsah pada saat ini aktif mengajar program S1, S2 dan S3 di FBE UII. Selain aktif mengajar, hingga saat ini ia juga selalu aktif melakukan penelitian, terutama pada bidang sistem informasi dan audit forensik. Disamping sebagai pengajar, juga sebagai praktisi dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi skala enterprise yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada berbagai industri baik pendidikan (perguruan tinggi dan yayasan) maupun non pendidikan (rumah sakit, pemerintah daerah, manufaktur, dan retail). Sebelum menerbitkan buku ini, ia juga telah mempublikasikan beberapa buku maupun book chapter, baik sendiri maupun bersama penulis yang lain, yaitu Perencanaan Strategis Sistem Informasi (2014), Factors Influencing Consumers to Use E-Services in Indonesian Airlines Companies (2015), dan Pencegahan Fraud dengan E-Procurement (2017), Peran Etika dalam Transaksi Daring (2020) dan Sistem Pendukung Keputusan Bisnis (2020).



Intan Paramita Sari, SE. Adalah seorang Corporate Action Manager pada PT Bank Muamalat Indonesia. Intan Paramita Sari telah menyelesaikan pendidikan pada program Sarjana bidang Akuntansi (S1) program internasional Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (FBE UII) pada tahun 2016. Saat ini aktif juga sebagai profesional teknologi informasi dalam bidang perbankan serta strategi & perencanaan perusahaan.



Irene Ika Wardhani, S.E., M.Ak. Adalah alumni dari Universitas Islam Indonesia (UII). Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi (S1) di Universitas Merdeka Malang pada tahun 2014. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, Irene kemudian melanjutkan pendidikan S2 nya di jurusan Magister Akuntansi di UII pada tahun 2016. Saat ini ia mengajar di Universitas Potensi Utama, Medan, Sumatera Utara.



Buku Seri Penelitian: Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa
pada Organisasi Pemerintah

IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DAN PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA

Oleh:

**Johan Arifin
Dekar Urumsah
Intan Paramita Sari
Irene Ika**



Penerbit EKONISIA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DAN PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA

Oleh:

Johan Arifin

Dekar Urumsah

Intan Paramita Sari

Irene Ika

Hak cipta © 2020, pada penulis

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang, dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, Oktober 2020

Hak Penerbitan pada EKONISIA Yogyakarta

Penerbit EKONISIA

Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283

Telp (0274) 886478, 881546 Fax. (0274) 882589

ISBN: 978-602-6617-58-3

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buku ini memberikan pemaparan tentang pentingnya manajemen pengadaan barang dan jasa untuk menekan kemungkinan terjadinya *fraud* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa di entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik lainnya. Selaras dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, penggunaan *E-Procurement* menjadi sangat penting dan relevan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa. *E-Procurement* diharapkan menjadi pengendali yang baik, sehingga celah-celah yang mungkin ada untuk terjadi *fraud* dapat dicegah dan dikendalikan.

Buku ini terdiri dari dua pokok bahasan utama. Bahasan yang pertama disajikan dalam Bab 1 yang mana fokusnya adalah membahas penerapan sistem *E-Procurement* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Hal ini dapat mengurangi praktik korupsi pada proyek-proyek pemerintah dan mencegah penyalahgunaan sumber daya sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, pokok bahasan kedua disajikan dalam Bab 2, yaitu membuktikan secara empiris berbagai faktor potensial untuk mencegah terjadinya *fraud* pada aktivitas pengadaan barang dan jasa. Dalam bab ini juga dibahas pentingnya penggunaan *E-Procurement* untuk mencegah terjadinya *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian penulisan buku ini, terutama Jurusan Akuntansi dan Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya kami sangat mengharapkan berbagai masukan, saran, tanggapan dan kritik dari para pembaca buku ini. Buku ini tidak terlepas dari kekurangan, namun kami tetap berharap buku ini bermanfaat bagi pengembangan bidang akuntansi dan auditing forensik.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, September 2020

Penulis

**Implementasi *E-Procurement* dan Pencegahan
Fraud Pengadaan Barang dan Jasa**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1: <i>E-PROCUREMENT</i> DI RUANG LINGKUP SEKTOR PUBLIK.....	1
1.1. Penerapan Sistem <i>E-Procurement</i> di Indonesia.....	1
1.1.1. Aspek Penerapan Sistem <i>E-Procurement</i>	2
1.2. Konsep Penerimaan Sistem <i>E-Procurement</i> di Ruang Lingkup Sektor Publik	3
1.2.1. Teori Keagenan	3
1.2.2. Electronic Procurement.....	3
1.2.3. Model Delone & McLean.....	4
1.3. Analisis Faktor Kesuksesan Penerapan Sistem <i>E-Procurement</i>	5
1.3.1. Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna	5
1.3.2. Kualitas Sistem dan Kepuasan Pengguna.....	6
1.3.3. Kualitas Layanan dan Kepuasan Pengguna.....	6
1.3.4. Kepuasan Pengguna dan Kesuksesan Sistem <i>E-Procurement</i>	6
1.4. Menganalisa Kesuksesan Pengimplementasian Sistem <i>E-Procurement</i>	7
1.4.1. Tinjauan Analisis Data.....	7
1.4.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	7
1.4.3. Karakteristik Demografis	8
1.5. Pengukur–Pengukur Kesuksesan Sistem <i>E-Procurement</i>	9
1.5.1. Hipotesis Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna (user).....	9
1.5.2. Hipotesis Kualitas Sistem dan Kepuasan Pengguna	9
1.5.3. Hipotesis Kualitas Layanan dan Kepuasan Pengguna	10
1.5.4. Hipotesis Kepuasan Pengguna dan Kesuksesan Pengimplementasian <i>E-Procurement</i>	10
1.6. Kesimpulan.....	11
1.6.1. Implikasi dan Kontribusi.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	13
BAB 2: FAKTOR-FAKTOR PENCEGAHAN <i>FRAUD</i> dan PERANAN <i>E-PROCUREMENT</i>	17
2.1. Mencegah <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	17

2.1.1.	Sekilas Hubungan <i>E-Procurement</i> (Teknologi), Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Etik dan Relegiusitas terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	19
2.2.	Konsep Metode Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	20
2.2.1.	<i>Fraud</i>	20
2.2.2.	Konsep Sistem Informasi.....	21
2.3.	Analisis metode Pencegahan <i>Fraud</i> barang dan Jasa.....	25
2.3.1.	<i>E-Procurement</i> dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	25
2.3.2.	Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	25
2.3.3.	Budaya Organisasi dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	26
2.3.4.	2.3.4 Etika dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	26
2.3.5.	Relegiusitas Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	27
2.3.6.	Model Efektif Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	27
2.4.	Menguji Metode Pencegahan <i>Fraud</i> Barang dan Jasa	28
2.4.1.	Strategi Analisis Data	28
2.4.2.	Uji Validitas Dan Reliabilitas	29
2.4.3.	Karakteristik Responden	29
2.5.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan <i>Fraud</i> Barang dan Jasa	29
2.5.1.	<i>E-Procurement</i> dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	30
2.5.2.	Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	30
2.5.3.	Budaya Organisasi dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	31
2.5.4.	Etika dan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	32
2.5.5.	Relegiusitas Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	33
2.6.	Kesimpulan.....	34
2.6.1.	Kontribusi dan Implikasi.....	34
	DAFTAR PUSTAKA	35

BAB 1:

***E-PROCUREMENT* DI RUANG LINGKUP SEKTOR PUBLIK**

Terjadinya krisis keuangan global menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi beberapa negara di dunia. Beberapa negara mulai menerapkan berbagai strategi manajemen keuangan sebagai bentuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Setiap tahunnya, pemerintah mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dengan melakukan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan *E-Procurement*. *E-Procurement* merupakan proses transaksi antara pihak otoritas dan vendor barang/jasa yang dilakukan secara elektronik. *E-Procurement* mencakup seluruh proses pembelian, mulai dari persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, proses tender, sistem pembayaran hingga proses manajemen kontrak. Tujuan penerapan sistem *E-Procurement* ini adalah agar dapat mengurangi praktik korupsi di dalam proyek-proyek pemerintah dan mencegah penyalahgunaan sumber daya, sehingga diharapkan dapat terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan sebagai bentuk penerapan e-governance.

1.1. Penerapan Sistem *E-Procurement* di Indonesia

Di Indonesia, implementasi *E-Procurement* ditugaskan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang kemudian sistem ini dioperasikan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah e-tendering. Selain itu, LKPP juga menyediakan fasilitas katalog elektronik (e-catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*) dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*). (<https://lpse.lkpp.go.id/eproc/tentangkami>).

Jumlah pengadaan barang dan jasa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari LKPP, pemanfaatan layanan pengadaan secara elektronik terus berkembang. Saat ini, pengadaan secara elektronik sudah dilayani oleh 631 LPSE yang tersebar di kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan instansi (<http://jogja.antaranews.com/berita/335758/lpse-yogyakarta-terima-penghargaan-nationalprocurement-award>).

1.1.1. Aspek Penerapan Sistem *E-Procurement*

Penerapan sistem *E-Procurement* di ruang lingkup pemerintahan tidak terlepas dari beberapa faktor (aspek), seperti adanya faktor efisiensi dan akuntabilitas (Hidayat, 2014). Selain aspek akuntabilitas dan efisiensi, penerapan sistem *E-Procurement* juga dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi (Uba *et al.*, 2013). Selain itu, kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem, landasan hukum yang tidak kuat, infrastruktur sistem yang kurang memadai, dan keamanan data, dapat menjadi tantangan yang memberikan pengaruh terhadap penerapan sistem *E-Procurement* (Kiprono, 2013).

Faktor penerimaan pengguna terhadap sistem informasi baru, memberikan pengaruh signifikan terhadap kesuksesan penerapan sistem (Mose *et al.*, 2013). Adanya dukungan manajemen, faktor teknis dan faktor lingkungan, juga menjadi faktor penting dalam penerapan sistem *E-Procurement* (Kangogo & Gakure, 2013). Penerapan sistem *E-Procurement* di ruang lingkup sektor publik dapat dipengaruhi oleh adanya kualitas sistem, kualitas pengguna dan kualitas layanan (Wanniaracgchise, 2014).

Adanya kualitas sistem informasi, persepsi manfaat penggunaan sistem, kualitas sistem dan persepsi kemudahan dalam penggunaan sistem akan mendorong terciptanya kepuasan pengguna terhadap penggunaan sistem (Zaied, 2012). Kesuksesan penerapan sistem *E-Procurement* dapat tercipta apabila didukung dengan adanya sistem informasi yang baik. Seperti adanya informasi (iklan) terkait tender, proses pengajuan proposal secara online, tersedianya daftar pemasok, pengajuan permohonan (*requisition*) secara online, dan sebagainya (Mose *et al.*, 2013). Meskipun kualitas sistem informasi menjadi bagian terpenting dalam suatu sistem informasi, namun kualitas sistem juga memiliki efek yang tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna terhadap sistem informasi (Khristianto *et al.*, 2012). Disisi lain, kualitas layanan memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna meski tidak secara signifikan (Mahmud *et al.*, 2013). Kualitas layanan juga memiliki peran penting dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan suatu sistem informasi (Hien *et al.*, 2014).

1.2. Konsep Penerimaan Sistem *E-Procurement* di Ruang Lingkup Sektor Publik

Ada beberapa teori (model) yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan penerimaan sistem informasi, salah satunya adalah model penerimaan sistem yang dikembangkan oleh Delone & McLean (1992). Pengukuran kesuksesan suatu sistem informasi sangatlah penting untuk melihat tingkat keberhasilan penerapan sistem tersebut, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan manajemen dalam investasi sistem informasi (Delone dan Mclean, 2003).

1.2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan tentang suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Eisenhardt, 1989). Dalam hubungan keagenan akan muncul beberapa konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan keinginan dan tujuan antara prinsipal dan agen. Agen tidak akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan prinsipal. Hal ini dapat terjadi apabila pihak manajemen melakukan tindakan demi mencapai kepentingannya sendiri. Untuk membatasi adanya pertentangan ini (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan dapat menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan kepentingan ini.

Proses pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak yang masing-masing memiliki tujuan (kepentingan) yang berbeda-beda. Adanya pihak pemangku kepentingan internal yang memiliki tujuan yang bertentangan, dapat menghambat kinerja pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Electronic Procurement

E-Procurement merupakan sistem pengadaan barang/jasa berbasis elektronik. *E-Procurement* mencakup seluruh proses pembelian, mulai dari persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, proses tender, sistem pembayaran hingga proses manajemen kontrak. Tujuan diterapkannya *E-Procurement* ini adalah sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, memberikan kemudahan akses informasi terkait pengadaan barang/jasa, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik, dan faktor akuntabilitas (Neupane *et al.*, 2012). Sistem *E-Procurement* dibagi kedalam 7 kategori (Ateto *et al.*, 2013):

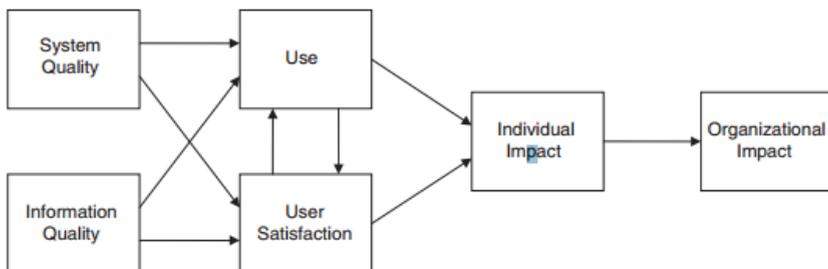
1. ERP (*Enterprise Resource Planning*) berbasis WEB;
2. E-MRO (*Maintenance, Repair and Operations*);
3. E-Sourcing;
4. E-Tendering;
5. E-Reverse Auctioning;

6. E-Informing yang merupakan sistem berbasis internet yang memuat informasi tentang mekanisme pembelian baik dari dan untuk pihak internal dan eksternal;
7. E-Market

Sistem *E-Procurement* memiliki beberapa kelebihan. Pertama, dapat menghemat penggunaan kertas, biaya pengiriman, dan sebagainya. Kedua, berkaitan dengan efisiensi waktu. Ketiga, karena semua proses dilakukan secara elektronik, maka dapat menekan biaya tenaga kerja. Kelebihan lainnya dari penerapan sistem *E-Procurement* adalah pihak otoritas dapat memonitor kinerja para vendor dengan melihat ketepatan waktu pengiriman, kualitas barang/jasa yang dikirim dari vendor–vendor tersebut (Ateto *et al.*, 2013). Selain itu, dengan menggunakan *E-Procurement*, maka komunikasi antara vendor dan otoritas akan lebih mudah dan cepat.

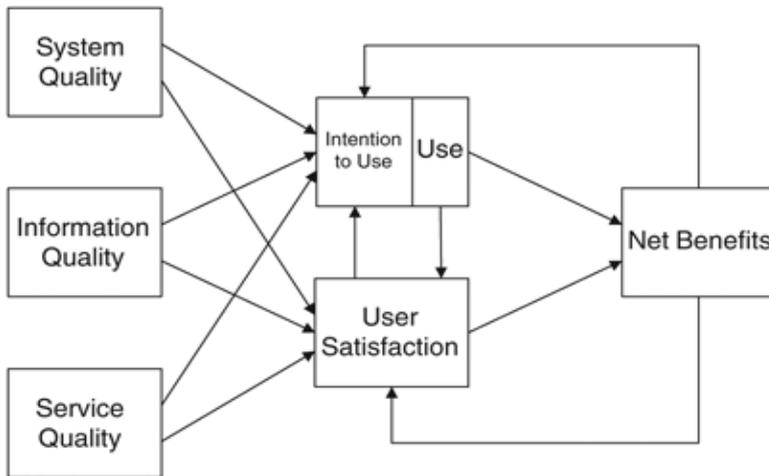
1.2.3. Model Delone & McLean

Kesuksesan sistem informasi dapat dibagi kedalam 6 elemen, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individual dan dampak organisasional (Delone & Mclean, 1992).



Gambar 1. Model Delone & Mclean (1992)

Seiring berjalannya waktu, model kesuksesan sistem informasi D&M mengalami perubahan, yang mana pada model terbarunya menambahkan beberapa variabel seperti kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, niat penggunaan, kepuasan pengguna dan keuntungan yang didapat (Delone & Mclean, 2003). Tingkat kesuksesan sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas informasi, kualitas sistem, adanya niat untuk menggunakan sistem, kualitas layanan dan kepuasan pengguna (Delone & Mclean, 2003). Model kesuksesan sistem informasi D&M sudah banyak diterapkan di beberapa penelitian untuk mengukur tingkat kesuksesan penerapan sistem informasi.



Gambar 2. Model baru Delone & Mclean (2003)

1.3. Analisis Faktor Kesuksesan Penerapan Sistem *E-Procurement*

Pada bagian ini akan dijelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan sistem *E-Procurement* dengan menggunakan model Delone dan Mclean (2003).

1.3.1. Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna

Kualitas informasi diukur dari tingkat keakurasian informasi, ketepatan waktu, kelengkapan informasi, relevansi dan konsistensi (Delone & Mclean, 1992). Kualitas informasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pengguna. Hal ini dikarenakan dengan tersedianya informasi yang memadai akan memberikan manfaat positif kepada para pengguna (Ajoye, 2014). Selain itu, dengan adanya kualitas informasi yang baik juga akan berpengaruh positif terhadap kinerja pengguna dalam organisasi (Abugabah *et al.*, 2009). Semakin tinggi kualitas informasi, maka akan semakin tinggi pula kepuasan pengguna (user) (Khristianto *et al.*, 2012). Di dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa kualitas informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. Oleh karena itu, kualitas informasi menjadi variabel penting untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna*

1.3.2. Kualitas Sistem dan Kepuasan Pengguna

Dengan adanya metode baru dalam proses pengadaan barang/jasa menjadi tantangan tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Maka dari itu, tersedianya kualitas sistem yang baik menjadi faktor krusial untuk mencapai kesuksesan penerapan sistem *E-Procurement*. Semakin tinggi kualitas sistem maka akan semakin tinggi tingkat penggunaan dan kepuasan pengguna, mampu memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas individu yang kemudian akan berdampak terhadap meningkatkan produktivitas organisasi (Delone & Mclean, 2003).

Kualitas sistem memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pengguna (Ajoye, 2014). Terdapat hubungan positif antara kualitas sistem dan kepuasan pengguna (Zaied, 2012). Namun, di sisi lain disebutkan bahwa kualitas sistem bukanlah faktor utama untuk menciptakan kepuasan pengguna terhadap suatu sistem (Khristianto *et al.*, 2012). Berdasarkan penjelasan di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Kualitas sistem memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna*

1.3.3. Kualitas Layanan dan Kepuasan Pengguna

Tersedianya petugas yang memiliki keahlian yang baik dalam memberikan layanan, akan memberikan pengaruh terhadap kesuksesan penerapan sistem *E-Procurement*. Adanya kualitas layanan yang buruk, akan berdampak pada hilangnya pelanggan dan penurunan penjualan (Delone & Mclean, 2003). Terdapat hubungan positif antara kualitas layanan dan kepuasan pengguna (Machanda, 2014). Dalam penelitian lain disebutkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna (Nwone, 2014). Meski kualitas layanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, namun kualitas layanan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan (Yang, 2007). Berdasarkan penjelasan di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Kualitas layanan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna*

1.3.4. Kepuasan Pengguna dan Kesuksesan Sistem *E-Procurement*

Kesuksesan penerapan sistem *E-Procurement* dapat diukur dengan tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Jika pengguna merasa puas dan terbantu dengan adanya sistem *E-Procurement*, maka

mereka akan terus menggunakan sistem ini. Meningkatnya kepuasan pengguna, maka akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan pengimplementasian sistem *E-Procurement*. Untuk mengukur kesuksesan sistem e-procurement dapat ditentukan dengan mengukur kepuasan pengguna dan kepuasan vendor (Vaidya *et al.*, 2006). Berdasarkan penjelasan di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Kepuasan pengguna memiliki pengaruh positif terhadap kesuksesan sistem eprocurement*

1.4. Menganalisa Kesuksesan Pengimplementasian Sistem *E-Procurement*

Pengujian kesuksesan pengimplementasian sistem *E-Procurement* dalam buku ini akan diuji dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode survei melalui kuesioner yang berfokus pada faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada kepuasan pengguna (pelanggan) dan kesuksesan pengimplementasian sistem *E-Procurement*. Data yang digunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan metode probability sampling, sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportionate stratified random sampling*. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2012). Responden yang dipilih untuk menganalisis kesuksesan sistem *E-Procurement* adalah para pengguna sistem *E-Procurement* yang merupakan karyawan/pegawai di ruang lingkup pemerintahan Yogyakarta.

1.4.1. Tinjauan Analisis Data

Structural Equation Model (SEM) digunakan untuk menganalisis model kesuksesan penerapan sistem *E-Procurement*, dan dibantu dengan menggunakan alat analisis SMARTPLS. Model SEM cocok untuk diterapkan pada penelitian yang melibatkan beberapa variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Tujuan penggunaan model SEM adalah untuk mengetahui apakah pola hubungan dari penelitian sebelumnya dapat dibuktikan dengan menggunakan data yang diperoleh (Karadag, 2012).

1.4.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian, mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper & Schindler, 2006). Uji validitas dilakukan terhadap seluruh pernyataan yang ada dalam setiap variabel, untuk mengetahui tingkat kevalidan setiap pernyataan terhadap variabel penelitian. Uji validitas terdiri dari dua jenis pengujian,

yaitu uji validitas convergent dan uji validitas discriminant. Uji validitas convergent dapat dipenuhi jika nilai *Average Variance Extracted* (AVE) lebih besar dari 0.5 ($AVE > 0.5$). Sedangkan uji validitas diskriminan dapat dipenuhi jika akar pangkat dua dari nilai AVE untuk setiap variabel lebih besar dari korelasi terbesar antara variabel tersebut dengan variabel lainnya (Fornel & Lacker, 1981).

Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Uji reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan nilai cronbach's alpha. Variabel (konstruk) dengan nilai cronbach's alpha 0.6 menunjukkan bahwa model pengukuran memenuhi syarat uji reliabilitas (Sekaran, 2006). Penelitian ini telah memenuhi syarat atas uji validitas dan uji reliabilitas, yang hasilnya terdapat pada Lampiran 1.

1.4.3. Karakteristik Demografis

Penelitian ini melibatkan para pegawai yang menggunakan sistem *E-Procurement* di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ULP Kota Yogyakarta, ULP Kabupaten Sleman, ULP Kabupaten Gunungkidul, ULP Kabupaten Kulonprogo dan ULP Kabupaten Bantul. Selain para pegawai yang bekerja di ULP, responden lainnya yang terlibat dalam penelitian ini adalah para vendor dari semua ULP. Jumlah pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 responden. Sedangkan untuk responden yang berasal dari vendor barang/jasa dari semua ULP adalah sebanyak 22 responden. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. Rincian Jumlah Responden

No	Responden	Jumlah Responden (Orang)
1	ULP Provinsi DIY	15
2	ULP Kota Yogyakarta	13
3	ULP Kabupaten Sleman	17
4	ULP Kabupaten Gunung Kidul	10
5	ULP Kabupaten Kulon Progo	11
6	ULP Kabupaten Bantul	9
7	Vendor (Penyedia barang/Jasa)	22
Total		97

1.5. Pengukur–Pengukur Kesuksesan Sistem *E-Procurement*

Adapun pengukur kesuksesan sistem *E-Procurement* yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model kesuksesan SI yang dikembangkan oleh Delone & Mclean (2003). Dari alat ukur tersebut nantinya dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya terhadap kesuksesan penerapan sistem *E-Procurement* di ruang lingkup pemerintahan DIY.

Berdasarkan uraian analisis faktor yang mempengaruhi kesuksesan sistem *E-Procurement*, telah dikembangkan 4 hipotesis yang hasil analisisnya akan dibahas secara detail pada bagian ini.

1.5.1. Hipotesis Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna (user)

Dari pengujian hipotesis pertama, diperoleh hasil bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna (*user*). Hasil ini dapat dilihat dari nilai t-statistik yang dimiliki yaitu sebesar 2.028360, yang mana nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel (1.664). Nilai path coefficient yang dihasilkan yaitu positif 0.274156 (Lihat Lampiran 2). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis pertama ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas informasi yang diberikan, maka akan semakin meningkatkan kepuasan penggunaannya. Hasil pengujian hipotesis pertama ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajoye (2014), Abugabah *et al.* (2009) dan Khristianto *et al.* (2012) yang menyebutkan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif langsung dan signifikan terhadap kepuasan penggunaannya. Baik LKPP maupun LPSE yang merupakan lembaga yang ditunjuk untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem *E-Procurement* diharapkan untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas informasi yang dimiliki dengan memperhatikan aspek ketepatan waktu, mudah dipahami, up-to-date, kecukupan informasi dan antarmuka pengguna (*user interface*).

1.5.2. Hipotesis Kualitas Sistem dan Kepuasan Pengguna

Dari pengujian hipotesis kedua, diperoleh hasil bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna (*user*). Hasil ini dapat dilihat dari nilai t-statistik yang dimiliki yaitu sebesar 2.376224 (Lihat Lampiran 2), yang mana nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel (1.664). Nilai *path coefficient* yang dihasilkan yaitu positif 0.314641 (Lihat Lampiran 2). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H2 dapat diterima. Hasil pengujian hipotesis kedua ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaied (2012) dan Ajoye (2014) yang menyebutkan bahwa kualitas

sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan penggunaannya (*user*). Semakin bagus kualitas sistem yang diberikan, maka akan meningkatkan kepuasan pengguna dalam memakai sistem *E-Procurement*.

LKPP dan LPSE sebagai lembaga pemerintahan yang ditunjuk untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem *E-Procurement* harus memberikan kualitas sistem yang baik dengan memperhatikan aspek keandalan sistem, responsif dan kepastian (seperti kepastiaan keamanan transaksi).

1.5.3. Hipotesis Kualitas Layanan dan Kepuasan Pengguna

Dari pengujian hipotesis ketiga, diperoleh hasil bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna (*user*). Hasil ini dapat dilihat dari nilai *t*-statistik yang dimiliki yaitu sebesar 2.947319 (Lihat Lampiran 2), yang mana nilai *t*-statistik lebih besar dari nilai *t*-tabel (1.664). Nilai *path coefficient* yang dihasilkan yaitu positif 0.335273 (Lihat Lampiran 2). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H3 dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis ketiga ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Manchanda (2014) dan Nwone (2014) yang menyebutkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan penggunaannya (*user*). Semakin bagus kualitas layanan yang diberikan, maka akan meningkatkan kepuasan pengguna dalam memakai sistem *E-Procurement*. LPSE sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengoperasikan sistem *E-Procurement* di ruang lingkup sektor publik harus mampu memberikan kualitas layanan yang baik kepada para penggunaannya (*user*) agar dapat meningkatkan kinerja organisasi.

1.5.4. Hipotesis Kepuasan Pengguna dan Kesuksesan Pengimplementasian *E-Procurement*

Dari pengujian hipotesis keempat, diperoleh hasil bahwa kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap kesuksesan pengimplementasian sistem *E-Procurement*. Hasil ini dapat dilihat dari nilai *t*-statistik yang dimiliki yaitu sebesar 4.231183 (Lihat Lampiran 2), yang mana nilai *t*-statistik lebih besar dari nilai *t*-tabel (1.664). Nilai *path coefficient* yang dihasilkan yaitu positif 0.416185 (Lihat Lampiran 2). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H4 dapat diterima. Hasil pengujian hipotesis ketiga ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mose *et al.* (2013) yang menyebutkan bahwa kesuksesan suatu sistem dapat dilihat dari diterimanya sistem tersebut oleh para penggunaannya (*user*). Ketika pengguna (*user*) merasa puas dengan menggunakan sistem *E-Procurement* dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan sistem ini, seperti mengurangi beban pekerjaan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini sukses diimplementasikan. Dari hasil pengujian hipotesis ini juga

dapat disimpulkan bahwa faktor organisasi menjadi faktor krusial dalam kesuksesan pengimplementasian sistem *E-Procurement*.

1.6. Kesimpulan

Pembahasan yang dipaparkan dalam buku ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan pengguna (*user*) terhadap kesuksesan pengimplementasian sistem *E-Procurement* di ruang lingkup pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan penggunaannya (*user*). Semakin baik kualitas – kualitas yang diberikan, maka akan meningkatkan kepuasan kepada para penggunaannya. Kepuasan pengguna terhadap sistem *E-Procurement* juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan pengimplementasian sistem *E-Procurement*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna atas penggunaan *E-Procurement*, maka akan mengarah kepada keberhasilan pengimplementasian sistem.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LPSE sebagai unit lembaga yang bertugas mengoperasikan sistem *E-Procurement* telah menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

1.6.1. Implikasi dan Kontribusi

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi atau pemahaman kepada pihak/lembaga yang mengontrol sistem *E-Procurement* untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kesuksesan pengimplementasian *E-Procurement*. Diharapkan dari hasil penelitian ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem agar sistem *E-Procurement* berhasil diterapkan. Selain itu juga diharapkan kepada pemerintah DIY ataupun entitas sektor publik lainnya dapat meningkatkan kualitas di setiap faktor yang memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penerapan sistem *E-Procurement*, dengan tujuan agar dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi praktik KKN di ruang lingkup pemerintahan.

Dari hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan organisasi untuk pengambilan keputusan terkait sistem *E-Procurement*. Disamping itu juga, hasil penelitian ini

dapat dijadikan sumber referensi baru bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerimaan sistem/teknologi. Penelitian yang dibahas dalam buku ini juga tidak lepas dari beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan jumlah responden yang hanya melibatkan 97 pengguna *E-Procurement* di ruang lingkup pemerintahan DIY, sehingga belum mewakili pengguna *E-Procurement* pada lingkup yang lebih luas. Kedua, penelitian ini hanya dilakukan di ruang lingkup pemerintahan DIY saja. Ketiga, keterbatasan variabel yang digunakan untuk mengukur kesuksesan pengimplementasian *E-Procurement*. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menganalisis kesuksesan pengimplementasian sistem *E-Procurement* dengan menambahkan beberapa variabel lainnya. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan melibatkan responden yang lebih banyak lagi, baik dari sektor publik maupun non sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abugabah, A., Sanzogni, L., & Poropat, A. (2009). The impact of information systems on user performance: A critical review and theoretical model. *International Conference on Information Systems (ICIS), World Academy of Science, Engineering and Technology*(57), 809–819. Retrieved from http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/31849/61131_1.pdf?sequence=1
- Ajoye, M. B. (2014). Information Systems User Satisfaction: a Survey of the Postgraduate School Portal. *Library Philosophy and Practice*, 2(12), 287.
- Ateto, D., Ondieki, S., & Okibo, W. (2013). The Effect of *E-Procurement* Practices on Effective Procurement in Public Hospitals: A Case of KISII Level 5 Hospital. *American International Journal of Contemporary Research*, 3(8), 103–111.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2011). *Business Research Methods*. New York: McGraw- Hill
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. *Information Systems Research*, 3(1), 60–95. <http://doi.org/10.1287/isre.3.1.60>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <http://doi.org/10.1073/pnas.0914199107>
- Eisenhardt, M. (1989). Agency Theory: and Assessment Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/10.2307/258191>
- Fornell, C., & Larcker, D. F.. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics. *Journal of Marketing Research*, 18(3), 382–388. <http://doi.org/10.2307/3150980>
- Gardenal, F., Andrea, D., & Manzo, V. (2013). A Model to Measure *E-Procurement* Impacts on Organizational Performance. *Journal of Public Procurement*, 13(3), 215–242.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Pieper, T. M., & Ringle, C. M. (2012). The use of partial least squares structural equation modeling in strategic management research: a review of past practices and recommendations for future applications. *Long range planning*, 45(5), 320–340.

- Hidayat, R. (2014). *E-Procurement Practices in Four Areas in East Java, Indonesia: Accountability, Efficiency and Barriers. International Integration for Regional Public Management*, 3(1), 14–19.
- Hien, L. T., Nguyen, T., & Cuong, P. H. (2014). – An Empirical Case in Lac Hong University. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 32(1), 1– 14.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kangogo, J., & Gakure, R. (2013). Factors Affecting Electronic Procurement Implementation in Automobile Industry of Kenya, 1(6), 193–203.
- Karadag, E. (2012). Basic Features of Structural Equation Modeling and Path Analysis with Its Place and Importance in Educational Research Methodology. *Bulgarian Journal of Science and Education Policy*, 6(1), 194–212. Retrieved from <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Basic+features+of+structural+equation+modeling+and+path+analysis+with+its+place+and+importance+in+educational+research+methodology#0>
- Khristianto, W., Suyadi, I., & Kertahadi. (2012). The Influence of Information, System Quality and Service Quality on Customer Satisfaction and Loyalty in Online Shopping. 2nd *International Journal of Academic Research*, 4(2), 28–41.
- Kiprono, R. (2013). Challenges of *E-Procurement* Adoption in the Kenyan Public Sector: A Survey of Parastatals in the Ministry of Finance. *School of Human Resource Development*, 1(1), 26–83.
- Mahmud, A., Jusoff, K., & Hadijah, S. T. (2013). The effect of service quality and price on satisfaction and Loyalty of Customer of commercial flight service industry. *World Applied Sciences Journal*, 23(3), 354–359. <http://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.23.03.13052>
- Manchanda, A. (2014). An Empirical Application of Delone and Mclean Model In Evaluating Decision Support System In The Banking Sector of Oman. *International Information Management Association*, 23(2), 47–58.
- Mose, J. M., Njihia, J. M., & Magutu, P. O. (2013). *E-Procurement* Adoption Among Large Scale Manufacturing Firms in Nairobi, Kenya, 9(13), 375–401.
- Neupane, A., Soar, J., Vaidya, K., & Yong, J. (2012). Role of Public *E-Procurement* Technology To Reduce Corruption in Government

Procurement. *Role of Public E-Procurement Technology To Reduce Corruption in Government Procurement*, 17-19(8), 304–334.

- Nwone, S. A. (2014). Exploratory Study of Information System User Satisfaction: A Study of University of Ibadan Post Graduate School Web Portal. *International Journal of Computer and Information Technology*, 3(6), 1372–1381.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business*. New Jersey: John Wiley & Sons
- Uba, Z., Sharifai, M. G., Mubaraka, C. M., Agaba, L., & Principal, D. (2013). *E-Procurement and Performance of Service Organizations in Uganda*, 5(12), 46–50.
- Vaidya, K., Sajeev, A. S. M., & Callender, G. (2006). *E-Procurement Initiatives in the Public Sector: A Literature Review of the Critical Success Factors*, 6(3), 70–99.
- Wanniarachchige, M. K. (2014). Determinants of Information System Success in Public Sector Organizations: With Special Reference to Organizations Located in the Matara District of Sri Lanka, (February), 3(5), 143–150.
- Yang, H. (2007). Assessing the effects of e-quality and e-satisfaction on website loyalty. *International Journal of Mathematics and Computers in Simulation*, 1(3), 288–294.
- Zaied, A. N. H. (2012). An Integrated Success Model for Evaluating Information System in Public Sectors. *Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences*, 3(6), 814–825.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Uji Relibilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
<i>Information Quality</i>	0.944738	0.954799
<i>Service Quality</i>	0.912235	0.934726
<i>System Quality</i>	0.900742	0.923753
<i>User Satisfaction</i>	0.911863	0.944532
<i>Successful of E-Procurement Implementation</i>	0.897498	0.92358

Hasil Uji Validitas

	AVE	Square Root AVE
<i>Information Quality</i>	0.751236	0.866739
<i>Service Quality</i>	0.741771	0.861261
<i>System Quality</i>	0.66956	0.818266
<i>User Satisfaction</i>	0.850249	0.922089
<i>Successful of E-Procurement Implementation</i>	0.707679	0.841237

Lampiran 2

Hasil Pengujian Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T-Statistics (O/STERR)
InfQ → US	0.274156	0.277668	0.135162	0.135162	2.028360
ServQ → US	0.335273	0.340775	0.113755	0.113755	2.947319
SysQ → US	0.314641	0.312053	0.132412	0.132412	2.376224
US → SEI	0.416185	0.435686	0.098361	0.098361	4.231183

BAB 2: FAKTOR-FAKTOR PENCEGAHAN *FRAUD* dan PERANAN *E-PROCUREMENT*

Tindakan *fraud* pada era saat ini sudah terjadi di berbagai tempat, tentunya ini sangat meresahkan masyarakat. *Fraud* yang terjadi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah sangat sering terjadi di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia. Upaya-upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu upaya yang dilakukan proses pengadaan barang dan menggunakan *E-Procurement* yang nantinya akan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan. Dengan adanya sistem informasi seperti *E-Procurement* dapat mencegah tindakan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.

2.1. Mencegah *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Perpres nomor 16 Tahun 2018 pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diatur oleh pemerintah Indonesia, tentunya tidak lepas bagi panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa untuk melakukan tindakan *fraud*.

Kebutuhan akan pengadaan barang dan jasa di era otonomi daerah semakin tinggi. Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilakukan

daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah untuk merencanakan dan pengadaan barang dan jasa. Tingginya kebutuhan daerah dalam pengadaan barang dan jasa membuat beberapa oknum memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana dinyatakan oleh Farida (2013) bahwa sistem dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini masih menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Sedikitnya ada 10 faktor yang menyebabkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah rawan kecurangan antara lain: 1) Tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender. 2) Suap untuk memenangkan tender. 3) Proses tender yang tidak transparan. 4) *Supplier* bermain mematok harga tertinggi. 5) Memenangkan perusahaan saudara. 6) Pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu. 7) Adanya almamater sentris, 8) Pengusaha tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan memenangkan tender, 9) Tender tidak diumumkan, 10) Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah (Setyadiharja, 2017).

Dari 10 penyebab terjadinya tindakan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di atas maka setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti proses tender yang tidak transparan adanya memenangkan perusahaan saudara (oknum pegawai). Adapun faktor eksternal seperti *Supplier* bermain mematok harga tertinggi dan pengusaha tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan memenangkan tender.

Guna mengatasi berbagai masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah maka mulai tahun 2012 pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengeluarkan surat edaran No 17/KA/02/2012 tentang kewajiban pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Setyadiharja, 2017). Tujuan dari pengadaan barang dan jasa secara online adalah untuk mengurangi pertemuan antara penyelenggara lelang barang dan jasa dengan peserta. Dengan sistem pengadaan secara *online* atau *E-Procurement* maka proses pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel (Setyadiharja, 2017). Provinsi Sumatera Utara salah satu daerah yang telah menerapkan sistem *E-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam upaya melaksanakan *E-procurement* maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah membentuk suatu Unit Layanan Pengadaan (ULP). Adanya ULP ini semua pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan dikonsentrasikan pada satu unit pelayanan sehingga akan memberikan keefektifan dari segi biaya dan waktu, lebih akuntabel dalam pelaksanaan pengadaannya serta pertanggungjawabannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 pasal 130.

Pemanfaatan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa dalam bentuk *E-procurement* ini diharapkan pemerintah kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat memperbaiki sistem pengadaan

barang dan jasa. Hal ini dikarenakan pelaksanaan e-procurement dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

2.1.1. Sekilas Hubungan *E-Procurement* (Teknologi), Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Etik dan Relegiusitas terhadap *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra-kualifikasi dan sourcing dengan menggunakan modul berbasis website (Nedialita, 2014). Dukungan teknologi informasi ini dapat meningkatkan kapabilitas Government dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah, serta mencapai efektifitas dan efisiensi

E-Procurement dapat mencegah timbulnya kecurangan. Hal ini disebabkan sistem *E procurement* dapat mengurangi intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa atau peserta, sehingga praktik-praktik kotor yang seringkali mewarnai proses pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat dicegah atau dihindari (Nedialita, 2014). Kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pengendalian internal. Pengendalian internal menurut Hermiyetti (2010) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang dilakukan dengan baik dapat mencegah tindakan kecurangan.

Faktor selanjutnya yang dapat mencegah kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah budaya organisasi. Budaya organisasi menurut Robbins dan Judge (2013) memiliki tujuh elemen penting yaitu: 1) Inovasi dan pengambilan risiko. Pada dimensi ini organisasi memberikan dorongan kepada anggota organisasi untuk lebih inovatif dan mampu mengambil risiko. 2) Perhatian terhadap detail. Pada dimensi ini organisasi mendorong agar anggota organisasi menunjukkan presisi, analisis, dan perhatian terhadap detail. 3) Orientasi atas hasil. Pada dimensi ini organisasi berfokus pada hasil atau hasil daripada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapainya. 4) Berorientasi pada manusia. Pada aspek ini menekankan jika keputusan yang diambil oleh manajemen, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang-orang dalam organisasi. 5) Orientasi tim yang merupakan semua kegiatan kerja mengutamakan tim bukan individu. 6) Agresivitas. Organisasi mendorong agar anggota organisasi bekerja secara agresif dan kompetitif bukan

santai. 7) Stabilitas. Organisasi menekankan mempertahankan status *quo* berbeda dengan pertumbuhan.

Faktor selanjutnya adalah etika, etika merupakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran (Rahmaniyah, 2010). Etika pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana terdapat dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah: (1) melaksanakan tugas dengan tertib, (2) Profesional, (3) independen, (4) bertanggung-jawab, (5) menghindari dan mencegah, (6) tidak menerima imbalan dan (7) menjaga rahasia. Faktor terakhir yang dapat mencegah tindakan kecurangan adalah religiusitas. religiusitas adalah bagaimana seorang individu memahami, menginternalkan dan mengintegrasikan norma-norma agama ke dalam diri mereka dan menjadi kepribadian mereka (Ahyadi, 2015).

2.2. Konsep Metode Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Terjadinya *fraud* pada pengadaan barang dan jasa tentu dapat membawa kerugian setiap organisasi. Tidak hanya dari segi finansial, tapi juga waktu dan tenaga untuk menyelesaikannya. Sehingga, di perlukan faktor yang dapat mencegah terjadinya *fraud*. Faktor-faktor tersebut akan dibahas pada bagian ini.

2.2.1. *Fraud*

Kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang berasal dari dalam ataupun luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Adi *et al.*, 2016). Jika suatu perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, kebangkrutan atau penggelapan uang dapat dideteksi atau dihindari. *Fraud* pegawai biasanya melibatkan tiga langkah: 1) mencuri sesuatu yang berharga (sebuah aktiva), 2) mengkonversi aktiva tersebut ke bentuk yang dapat digunakan (kas), dan 3) menutupi kejahatannya agar tidak diketahui.

Sementara itu kecurangan pada tingkatan manajemen biasanya terdiri atas tiga karakter: 1) *Fraud* ini dilakukan pada tingkat manajemen, di atas tingkat manajemen di mana struktur kontrol internal biasanya berkaitan; 2) *Fraud* ini biasanya melibatkan penggunaan laporan keuangan untuk menciptakan ilusi bahwa entitas lebih sehat dan lebih makmur dari kenyataannya; (3) Jika *fraud* tersebut melibatkan pernyataan aktiva secara salah, ia biasanya dikelilingi oleh transaksi bisnis yang kompleks, yang sering kali melibatkan pihak ketiga.

Fraud Triangle Theory

Fraud triangle theory pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. *Fraud triangle theory* merupakan ide yang timbul dari penyebab munculnya kecurangan. Sebagaimana namanya *fraud triangle* maka penyebab dari *fraud triangle* terdiri dari tiga komponen yang umumnya ada pada saat *fraud* terjadi. Ketiga komponen tersebut adalah *incentive/pressure, opportunity,* dan *attitude/rationalization* (Turner, Mock dan Srivasta, 2003).

Komponen pertama *Pressure* atau tekanan merupakan adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan atau tuntutan yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* dapat dibagi menjadi: (1) Tekanan keuangan, (2) *Personal Financial need*, (3) *Financial Target*. Komponen yang kedua *Fraud* tidak hanya terjadi jika ada tekanan, tetapi juga ketika pelaku *fraud* melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan. Ada beberapa faktor utama yang dapat meningkatkan peluang yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* yaitu: (1) Kurangnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi perilaku yang menyimpang. (2) Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja dengan tepat. (3) Kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku *fraud*. (4) Kurangnya informasi. (5) Ketidakpedulian, apatis, dan ketidakmampuan. (6) Kurangnya jejak audit (Iqbal dan Murtanto, 2016).

Komponen ke tiga Rasionalisasi salah satu komponen penting dalam tindakan *fraud*. Kecenderungan pelaku *fraud* adalah membenarkan tindakan yang dilakukannya dengan pola pikir tertentu seperti "tidak akan ada yang dirugikan," "perusahaan berhutang kepada saya," "semua orang juga melakukan hal yang sama," dan alasan-alasan lain. Dari tiga penyebab *fraud, opportunity* merupakan hal dasar yang dapat terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisasi mulai dari atas. Organisasi perlu untuk membangun sebuah proses, prosedur dan kontrol sehingga membuat karyawan dalam posisi tidak dapat melakukan *fraud* dan yang efektif dapat mendeteksi aktivitas kecurangan jika hal itu terjadi (Iqbal dan Murtanto, 2016).

2.2.2. Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, organisasi dan sumber daya Manusia (Pearlson, 2001). Dalam penelitian ini teknologi akan diwakili oleh variabel *E-Procurement*. Kemudian organisasi akan diwakili oleh variabel sistem pengendalian internal dan variabel budaya organisasi.

Sedangkan untuk sumber daya manusia akan diwakili oleh variabel etik dan variabel religiusitas.

E-Procurement

E-Procurement yaitu sebuah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet. Secara umum tujuan dari diterapkannya *E-Procurement* yaitu untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa (Davila, Gupta dan Palmer 2003). Manfaat yang dapat diperoleh dalam penerapan *E-Procurement* yaitu membagi keuntungan dari *E-Procurement* menjadi 2 yaitu, keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan tidak langsung, (*E-Procurement* membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan *customer services*, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja) (Teo, Lin dan Lai, 2009).

Fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dalam *E-Procurement* yaitu: E-Lelang Umum (*E-Regular Tendering*), E-Lelang Penerimaan (*E-Reverse Tendering*), E-Pembelian (*E-Purchasing*), E-Penawaran Langsung (*E-Price Quotation*), E-Penawaran Berulang (*e-Reverse Auction*), E-Pembelian Langsung (*E-Direct Purchasing*), E-Seleksi (*E-Selection*), E-Katalog (*e-Catalog*). Beberapa negara yang telah berhasil menerapkan implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik diantaranya Australia dan Skotlandia. Keberhasilan kedua negara tersebut ikut andil dalam perkembangan sistem *E-Procurement* di negara lain termasuk Indonesia.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris pada suatu perusahaan atau korporasi yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Hermiyetti, 2010) .

Pengendalian internal mempunyai lima komponen yang saling berhubungan antara lain: (a) lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern,

menyediakan disiplin dan intern. (b) aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. (c) penilaian resiko merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. (d) Informasi dan komunikasi menyangkut penyampaian informasi kepada semua yang terlibat dalam pelaporan keuangan agar mereka memahami bagaimana aktivitasnya berhubungan dengan pekerjaan orang lain, baik didalam organisasi maupun luar organisasi. (e) Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan perbaikan.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. dengan kata lain, budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut (Robbins dan Judge, 2013)

Budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dimiliki oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain Robbins dan Judge, (2013). Terdapat sepuluh fungsi utama budaya organisasi, diantaranya: (1) Sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi maupun kelompok lain, (2) sebagai perekat bagi anggota organisasi dalam suatu organisasi, (3) mempromosikan stabilitas sistem sosial, (4) sebagai mekanisme dalam memandu dan membentuk sikap serta perilaku anggota-anggota organisasi, (5) sebagai integrator, budaya organisasi dapat dijadikan integrator karena adanya sub-sub budaya baru, (6) membentuk perilaku bagi anggota-anggota organisasi, (7) sebagai saran untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok organisasi, (8) sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pemasaran, segmentasi pasar, penentuan *positioning* yang akan dikuasai perusahaan tersebut, (9) sebagai alat komunikasi, budaya organisasi dapat berfungsi sebagai alat komunikasi antara atasan dan bawahan atau sebaliknya, serta antar anggota organisasi, (10) sebagai penghambat berinovasi budaya organisasi dapat juga menjadi penghambat dalam berinovasi (Tika, 2008).

Komponen budaya organisasi pada penelitian ini mengacu pada, (1) Inovasi dan pengambilan risiko, (2) Perhatian terhadap detail, (3) Orientasi atas hasil, (4) berorientasi pada manusia, (5) Orientasi tim yang merupakan semua kegiatan kerja

mengutamakan tim bukan individu, (6) Agresivitas, organisasi mendorong agar anggota organisasi bekerja secara agresif dan kompetitif bukan santai, (7) Stabilitas. Organisasi menekankan mempertahankan status *quo* berbeda dengan pertumbuhan (Robbins dan Judge 2013).

Etik

Etika merupakan sistem nilai yang menjadi pedoman bagi suatu kelompok masyarakat dalam setiap tindakannya. Jika etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggungjawab dalam melakukan berbagai hal. Sehingga dapat diasumsikan bahwa etika pegawai yang buruk akan mempengaruhi tindakannya dalam melakukan tindak kecurangan (Fachrunisa, Hasan dan Safitri 2015). Jadi semakin baik etika pegawai, maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud*.

Etika dalam penelitian ini mengacu pada etika pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: (a) Melaksanakan tugas dengan tertib, (b) profesional, (c) independen, (d) bertanggungjawab, (e) menghindari dan mencegah, (f) tidak menerima imbalan dan (g) menjaga rahasia.

Relegiusitas

Relegiusitas merupakan komitmen seseorang untuk melaksanakan apa yang diyakininya. Tingkat relegiusitas seseorang dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan sesuai atau tidak dengan nilai-nilai agama yang diyakininya. Komponen dari relegiusitas pada penelitian ini terdiri atas: (1) ideologis yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan individu terhadap agama mereka, nilai-nilai terutama ajaran atau nilai-nilai fundamental atau dogmatis, (2) ritualistic yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan individu dalam melakukan ritual kegiatan seperti yang diperintahkan oleh agama mereka, (3) eksperiensial yang berhubungan dengan tingkat perasaan dan pengalaman religius individu, (4) intelektual/pengetahuan individu yang di nilai agama mereka, terutama tentang ajaran dasar atau nilai yang bisa ditemukan dalam tulisan suci, (5) praktik/konsekuensi yang berkaitan dengan tingkat perilaku individu yang dimotivasi oleh agama mereka. Perilaku dalam hal ini adalah perilaku duniawi, yaitu bagaimana individu berhubungan dengan dunia mereka (Robbins, Glock dan Stark, 1994).

2.3. Analisis metode Pencegahan *Fraud* barang dan Jasa

Pada bagian ini akan di jelaskan secara detail mengenai pengembangan hipotesis yang dibangun guna untuk mengetahui berbagai faktot yang efektif untuk melakukan pencegahan tindakan *fraud*.

2.3.1. *E-Procurement* dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Penerapan *E-Procurement* pada dasarnya diimplementasikan dalam rangka mencegah timbulnya *fraud*. Hal ini disebabkan sistem *E-Procurement* dapat mengurangi intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa atau peserta, sehingga praktik-praktik kotor yang seringkali mewarnai proses pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat dicegah atau dihindari (Nedialita, 2014). Hal ini di buktikan oleh Nugroho *et al.* (2015) menunjukkan bahwa hasil penelitian sistem *E-Procurement* berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Jadi semakin baik dalam penerapan *E-Procurement* semakin tinggi pula pencegahan terhadap *fraud*. Oleh sebab itu, dari uraian tersebut dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: *E-Procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

2.3.2. Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Hermiyetti, 2010). Pengendalian internal yang dilakukan dengan baik dapat mencegah tindakan kecurangan. Jadi sistem pengendalian yang baik pada akhirnya dapat menutup seseorang akan melakukan kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Hal ini di buktikan oleh Hermiyetti (2010) Joseph *et al.* (2015), Rozmita *et al.* (2015) pengendalian internal berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan uraian ini maka hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

H2: *Sistem pengendalian internal* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

2.3.3. Budaya Organisasi dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dimiliki oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain (Robbins dan Judge, 2013). Tujuh elemen penting yaitu, 1) Inovasi dan pengambilan risiko dimana anggota organisasi didorong untuk lebih inovatif dan mampu mengambil risiko. 2) Perhatian terhadap detail. Organisasi diharapkan menunjukkan presisi, analisis, dan perhatian terhadap detail. 3) Orientasi atas hasil. Organisasi berfokus pada hasil atau hasil daripada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapainya. 4) Berorientasi pada manusia. Keputusan manajemen mempertimbangkan dampaknya terhadap orang-orang dalam organisasi. 5) Orientasi tim. Kegiatan kerja dilakukan berdasarkan tim bukan individu. 6) Agresivitas. Setiap anggota organisasi secara agresif dan kompetitif bukan santai. 7) Stabilitas. Kegiatan organisasi menekankan mempertahankan status *quo* berbeda dengan pertumbuhan (Robbins dan Judge, (2013). Uraian di atas didukung penelitian Zelmianti dan Anita (2015), Dhany *et al.* (2016), Surjandari dan Martaningtyas (2015) bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara budaya organisasi dengan pencegahan terhadap kecurangan. Jadi dari uraian ini maka hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

H3: *Budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud.*

2.3.4. 2.3.4 Etika dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Etika merupakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran (Rahmaniyah, 2010).

Etika pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah (1) melaksanakan tugas dengan tertib, (2) profesional, (3) independen, (4) bertanggung-jawab, (5) menghindari dan mencegah. (6) tidak menerima dan memberi imbalan, (7) menjaga rahasia. Etika perlu diciptakan untuk mencegah terjadinya kolusi dan korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Adi *et al.* (2016) dan Said *et al.* (2017) membuktikan jika tindakan etik dapat mencegah terhadap terjadinya kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

H4: *Etika berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.*

2.3.5. Relegiusitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

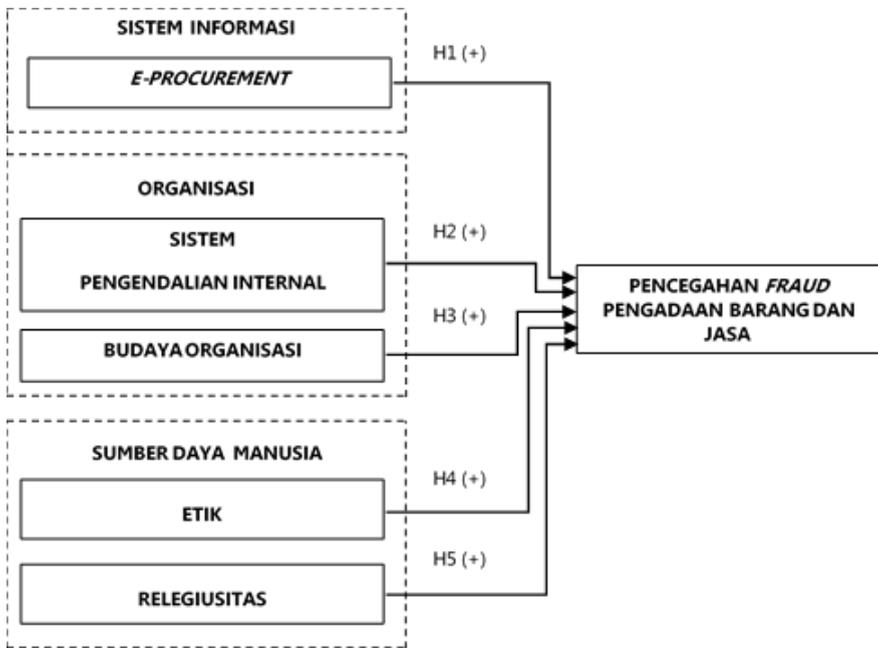
Religiusitas adalah bagaimana seseorang individu memahami, menginternalkan dan mengintegrasikan norma-norma agama ke dalam diri mereka dan menjadi kepribadian mereka (Ahyadi, 2015). Relegiusitas atau agama dipercaya dapat mengontrol perilaku seseorang dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakininya.

Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku untuk melakukan kecurangan. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang diyakininya melalui perasaan bersalah terutama dalam hal melakukan kecurangan (Basri, 2015). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Amaliah (2015) serta Basri (2015) membuktikan jika relegiusitas dapat mencegah terjadinya kecurangan. Maka dari uraian ini hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

H5: *Relegiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.*

2.3.6. Model Efektif Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Pada buku ini, akan ditunjukkan berbagai faktor yang dapat mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa. Ilustrasinya dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Model Efektif pencegahan *Fraud*

2.4. Menguji Metode Pencegahan *Fraud* Barang dan Jasa

Model pencegahan *fraud* barang dan jasa dalam yang dibahas dalam buku ini akan di uji menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *survey* seluruh pegawai yang bekerja di ULP Provinsi Sumatra Utara. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus (Riduwan, 2013). Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 150 orang.

2.4.1. Strategi Analisis Data

Penelitian ini melakukan analisis data dengan menggunakan software Smart PLS versi PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian ini menguji kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat prediktif model (Ghozali & Latan, 2012). Tujuan PLS adalah untuk mengembangkan teori atau membangun teori (orientasi prediksi). PLS digunakan untuk menjelaskan ada atau tidak hubungan antar variabel laten. PLS adalah metode analisis yang *powerfull* karena tidak mengasumsikan data arus dengan pengukuran skala tertentu dan jumlah sampel kecil (Ghozali & Latan, 2012).

2.4.2. Uji Validitas Dan Reliabilitas

Penelitian ini telah memenuhi syarat uji validitas dan reliabilitas (Lihat lampiran 1). Uji validitas mempunyai dua jenis pengujian yang dilakukan yaitu, uji validitas konvergen diukur dengan nilai *loading factor* dengan melihat kolerasi antara *score item* indikator dengan *score* konstraknya. Nilai *loading factor* dianggap *reliable* jika memiliki nilai kolerasi diatas 0.70, akan tetapi pada riset tahap pengembangan skala, nilai *loading factor* 0.50 masih dapat diterima (Ghozali & Latan, 2012).

Ukuran selanjutnya untuk validitas konvergen adalah nilai *average variance extracted* (AVE). Nilai AVE direkomendasikan harus lebih besar dari 0.50 (Ghozali & Latan, 2012). Sedangkan yang ke dua yaitu uji validitas diskriminan dapat terpenuhi jika akar pangkat dua dari nilai AVE untuk masing-masing variabel lebih besar dari kolerasi terbesar antara variabel tersebut dengan variabel lainnya (Ghozali & Latan, 2012). Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* lebih besar dari 0.70 (Ghozali & Latan, 2012).

2.4.3. Karakteristik Responden

Proses pengujian untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mencegah *fraud* ini melibatkan 150 responden di ULP Sumatera Utara. Dari 150 kuesioner yang didistribusikan hanya 124 atau 82,6% yang memenuhi syarat. Dari 124 responden penelitian didominasi oleh responden dengan jenis laki-laki sebanyak 71 responden atau 57,3%. Mayoritas usia responden penelitian didominasi oleh responden dengan usia 30 sampai dengan 40 tahun dengan jumlah responden 64 atau 51,6 % dari seluruh total responden. Untuk latar belakang pendidikan responden mayoritas dengan tingkat S1 yang berjumlah 79 responden atau 63,7%. Dari seluruh responden penelitian didominasi oleh responden dengan latar belakang keilmuan bisnis (Manajemen, Akuntansi, Keuangan, Ekonomi, pemasaran) yang berjumlah 77 responden atau sebesar 62,1% dari total keseluruhan responden yang rata-rata sudah bekerja selama 4 sampai dengan 5 tahun, dengan mayoritas pendapatan responden kisaran Rp. 2.500.000 samapi dengan Rp. 5.000.000 namun ada juga responden yang memiliki gaji di bawah Rp. 2.500.000 sebanyak 30 responden atau 24.2%.

2.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* Barang dan Jasa

Berdasarkan tinjauan pustaka secara umum, telah dikembangkan 5 hipotesis yang dibuat guna mengetahui berbagai faktor yang efektif dalam pencegahan *fraud*. Faktor-faktor yang dimaksud tersebut ialah *E-*

Procurement (teknologi); pengendalian internal dan budaya organisasi (organisasi); etik dan religiusitas (Sumber daya Manusia). Hasil analisis terkait dengan ke - 5 hipotesis secara detail akan dibahas pada bagian ini.

2.5.1. E-Procurement dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil *inner* model (Lihat lampiran 2) dari variabel sistem *E-Procurement* terdapat pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa *E-Procurement* memiliki t statistik $3,567 > 1,96$, dengan demikian variabel *E-Procurement* terbukti secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti hipotesis pertama **di dukung**.

Dalam konsep *fraud triangle theory* kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa disebabkan karena adanya peluang (*opportunity*). Berkaitan dengan *E-Procurement* maka dapat meminimalisir peluang (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan. Hal ini dikarenakan *fraud* tidak hanya terjadi jika ada tekanan, tetapi juga ketika pelaku *fraud* melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini membuktikan jika pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan *E-Procurement* di Provinsi Sumatera Utara terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Pemanfaatan *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat mencegah *fraud* karena dalam prosesnya intensitas pertemuan antara panitia pengadaan barang dan jasa dengan calon vendor sangat minim sehingga peluang panitia pengadaan barang dan jasa untuk melakukan kecurangan dapat dihindari (Nedialita, 2014).

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Nugroho *et al.* (2015) yang menunjukkan bahwa sistem *E-Procurement* berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa. Jadi semakin baik dalam penerapan *E-Procurement* semakin tinggi pula pencegahan terhadap *fraud*.

2.5.2. Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil *inner* model (Lihat lampiran 2) variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki t statistik $2,072 > 1,96$, dengan demikian variabel Sistem Pengendalian Internal terbukti secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti hipotesis ke dua **didukung**.

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang

efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Hermiyetti, 2010). Pengendalian internal yang dilakukan dengan baik dapat mencegah tindakan kecurangan. Jadi sistem pengendalian yang baik pada akhirnya dapat menutup sesorang akan melakukan kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Dalam konsep *fraud triangle theory* kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa disebabkan karena adanya, peluang (*opportunity*), tekanan (*pressure*) dan rasionalisasi. Dengan demikian sistem pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa dapat mencegah terjadinya kecurangan. Peluang, tekanan, rasionalisasi dapat hilang jika organisasi menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik. Hasil penelitian mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Mufidah (2017), Hermiyetti (2010) Joseph *et al.* (2015), Rozmita *et al.* (2015) yang juga membuktikan jika pengendalian internal berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan faktor utama untuk dapat mendeteksi dan mencegah jika adanya aktivitas penyimpangan yang akan berakibat pada kerugian pemerintah. Adapun untuk membangun sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien di ULP Provinsi Sumatera Utara harus ada komitmen dari semua pegawai dari tataran manajemen maupun pegawai biasa seperti penyampain informasi yang memadai. Hal ini dikarenakan tanpa adanya komitmen dari semua pihak sistem pengendalian internal tidak akan berjalan dengan baik.

2.5.3. Budaya Organisasi dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil *inner* model (lihat lampiran 2) variabel Budaya organisasi memiliki t statistik $2,885 > 1,96$, dengan demikian variabel budaya organisasi terbukti secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti hipotesis ke tiga **didukung**.

Budaya organisasi dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sumatera Utara karena budaya yang dibentuk mengarah pada perbaikan internal seperti manajemen menekankan untuk mempertahankan mekanisme kerja yang berlaku saat ini daripada melakukan perubahan. Mekanisme kerja yang dilaksanakan tentunya berdasarkan sistem yang telah diterapkan. Kebiasaan akan menjalankan atau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengurangi peluang pegawai melakukan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Dari urian ini maka budaya organisasi dapat mencegah terhadap terjadinya kecurangan karena organisasi memperhatikan setiap detail

dalam melaksanakan pekerjaan. Budaya tersebut adalah tidak menerima berkas dari vendor secara manual, semua berkas pengajuan harus dilakukan secara *online* dan juga budaya untuk teliti dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ketelitian merupakan budaya yang harus diterapkan dalam penerapan *E-Procurement*, karena jika pegawai tidak teliti maka bisa saja berkas dari calon vendor tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Kesalahan berkas atau persyaratan yang cacat/kurang dapat menyebabkan problem serius dalam pengadaan barang dan jasa (Kurniati, 2017), sehingga setiap pegawai harus mulai menyesuaikan diri dengan sistem dan cara kerja yang baru dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zelmiyanti dan Anita (2015), Dhany *et al.* (2016), Surjandari dan Martaningtyas (2015) membuktikan jika ada pengaruh yang positif dan signifikan antara budaya organisasi dengan pencegahan terhadap kecurangan.

2.5.4. Etika dan Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil *inner* model (lihat lampiran 2) variabel Etika pegawai memiliki t statistik $2,070 > 1,96$, dengan demikian variabel etika pegawai terbukti secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti hipotesis ke empat **didukung**.

Dalam konsep *fraud triangle theory* etika berkaitan dengan peluang (*opportunity*). Dengan demikian etika pegawai dapat mengurangi tindakan kecurangan karena para pegawai berpegang teguh pada etika dalam bekerja. Etika pegawai yang diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti tidak mempengaruhi orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. *Fraud* tidak hanya terjadi jika ada tekanan, tetapi juga ketika calon pelaku *fraud* melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan.

Etika merupakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran (Rahmaniyah., 2010) . Dengan demikian semakin baik etika para pegawai di ULP Provinsi Sumatera Utara dalam proses pengadaan barang dan jasa maka semakin tinggi pula keinginan para pegawai untuk mencegah terjadinya *fraud*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi *et al.* (2016) dan Said *et al.*, (2017) yang mana membuktikan jika tindakan etik dapat mencegah terhadap terjadinya kecurangan pada suatu organisasi.

Terciptanya etika pegawai sesuai dengan Undang-Undang dapat membantu pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa (Arifianti,

Santoso, & Handajani, 2015). Cara untuk menerapkan etika pegawai ULP adalah dengan memberlakukan *reward* dan *punishment* bagi yang melaksanakan dan melanggar etika pegawai tersebut. Selain itu, penting untuk menjadikan salah satu materi dalam pembekalan pegawai baru di ULP adalah mengenai etika pegawai (Faradiza & Suci, 2017). Selain itu, sosialisasi tentang etika pegawai harus dilakukan secara konsisten, hal ini dimaksudkan agar semua pegawai benar-benar memahami bahwa ada etika yang harus dijalankan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Guna menjamin terlaksananya etika pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di ULP maka diperlukan tim yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan etika pegawai.

2.5.5. Relegiusitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil *inner* model (lihat lampiran 2) variabel Relegiusitas memiliki t statistik $2,213 > 1,96$, dengan demikian variabel relegiusitas terbukti secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti hipotesis ke lima **didukung**.

Religiusitas adalah bagaimana seorang individu memahami, menginternalkan dan mengintegrasikan norma-norma agama ke dalam diri mereka dan menjadi kepribadian mereka (Purnamasari dan Amaliah., 2015). Setiap ULP di Sumatera Utara memiliki cara masing-masing untuk meningkatkan relegiusitas para pegawai mereka (Adhim, 2009). Pengamalan terhadap kepercayaan yang dianut oleh setiap pegawai harus diwujudkan secara nyata dalam melaksanakan pekerjaan. Bagi pegawai yang beragama Islam ada kajian khusus yang dilaksanakan secara rutin. Kajian ini dimaksudkan agar mereka dapat meresapi ajaran agama mengenai kejujuran dalam bekerja dan takut jika melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Amaliah (2015), Relegiusitas berkaitan dengan karakteristik setiap individu dan tidak dapat dilihat dengan mata. Relegiusitas pegawai bukan hanya pelaksanaan kewajiban seseorang dalam melaksanakan perintah agamanya masing-masing. Jadi untuk mengimplentasikan relegiusitas seseorang menjadi tindakan dalam melaksanakan pekerjaan maka diperlukan penanaman nilai-nilai relegiutas dalam bekerja (Rifa'i, 2016). Maka dari itu setiap ULP di Sumatera Utara perlu membuat program yang dapat meningkatkan relegiusitas pegawai seperti kajian rutin setiap jum'at dengan mengundang tokoh agama tertentu, mengadakan kegiatan agama dan lain sebagainya. Program-program tersebut perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan pemahaman pegawai mengenai nilai-nilai relegiusitas dalam bekerja.

2.6. Kesimpulan

Pengujian yang dibahas dalam buku ini dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan e-procurement (teknologi); pengendalian internal dan budaya organisasi (organisasi); etik dan religiusitas (Sumber daya Manusia) terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintahan daerah tepatnya di Lembaga pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara. Hasil yang ditemukan adalah ke-lima variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan *fraud*.

2.6.1. Kontribusi dan Implikasi

Hasil pengujian dalam buku ini menunjukkan bahwa semua variabel berkontribusi dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa di provinsi Sumatera Utara. Harapnya, hasil dari pengujian ini dapat dijadikan sumber referensi tambahan yang dapat bermanfaat bagi akademisi selanjutnya, terutama bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian serupa.

Melalui pembahasan di buku ini diharapkan pemerintah ULP Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan etika pegawai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pimpinan ULP di Seluruh Provinsi Sumatera Utara adalah pegawai tidak menerima dan memberi imbalan dan selalu menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik. Kedua hal ini perlu mendapat perhatian lebih karena mendapatkan skor yang paling rendah diantara komponen lainnya. Sementara itu berkaitan dengan budaya organisasi ULP Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan perubahan dalam mekanisme kerja, untuk memudahkan pegawai dengan mencegah terjadinya *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, F. (2009). Pengaruh Religiusitas Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Alumni Dan Bukan Alumni Pesantren (Studi pada Kantor Depag Kabupaten Bangkalan) Fauzan Adhim. *Jurnal Ekonomi Moderasi*, 5 (2), 127–154.
- Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (*Fraud*) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 10, 1–10.
- Ahyadi, A. (2015). *Psikologi agama: kepribadian muslim Pancasila*. Ba: Sinar Baru.
- Arifianti, R., Santoso, B., & Handajani, L. (2015). Perspektif Triangle *Fraud* Theory Dalam Pengadaan Barang Jasa di Pemerintah Provinsi NTB. *InFestasi*, 11 (2), 195–213.
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh dimensi budaya dan religiusitas terhadap kecurangan pajak.
- Dhany, umi rahma, Priantono, S., & Budiarto, M. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Peminimalisir *Fraud* (Kecurangan) Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, 4 (2), 46–60.
- Davila, A., Gupta, M., & Palmer, R. (2003). Moving Procurement Systems to the Internet: *European Management Journal*, 21 (1), 11–23.
- Fachrunisa, A., Hasan, A., & Safitri, D. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar). *Jom FEKON*, 2 (2), 1–15.
- Faradiza, S. A., & Suci, K. C. (2017). Pengaruh Sosialisasi dan Komitmen Profesi Pegawai Pajak Terhadap Niat Whistleblowing. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10 (1), 109–130.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2012). *Partial Least Square, Konsep Teknik, dan Aplikasi menggunakan program Smart PLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermiyetti. (2010). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 4 (2), 1–14.
- Iqbal, M., & Murtanto. (2016). Analisa Pengaruh Faktor-Faktor *Fraud* Triangle terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada

- Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Seminar Nasional Cendekiawan 2016*, 1–17.
- Joseph, O. N., Albert, O., & Byaruhanga, J. (2015). Effect of Internal Control on *Fraud* Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. *International Journal of Business and Management Invention*, 4 (1), 47–57.
- Kurniati, G. (2017). Jasa Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah G. *Jurnal Hukum Positum*, 1 (2), 311–327.
- Mufidah. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Persediaan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Upaya Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Persediaan Pada PT Mitra Jambi Pratama. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17 (3), 103–109.
- Nedialita, A. (2014). Kinerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1 (1), 12–22.
- Nugroho, R. S., Wanto, A. H., & Trisnawati. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada SKPD Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik*, 3 (1), 1905–1911.
- Pearlson, k. E. (2001). *Managing and Using Information System: A Strategic Approach*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Purnamasari, P., & Amaliah, I. (2015). *Fraud* Prevention: Relevance to Religiosity and Spirituality in the Workplace. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(2), 827–835.
- Rahmaniyah, I. (2010). *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*.
- Riduwan. (2013). *Dasar-dasar Statistika. Cetakan kesebelas*. Bandung: Alfabeta.
- Rifa'i, N. K. (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Religius Berbasis Multikultural Dalam Membentuk Insan Kamil. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4 (1), 117–133.
- Robbins, S.P., & Judge, T. (2013). *Organizational Behavior, Edition. 15*. New Jersey: Pearson Education.

- Robbins, R., Glock, C. Y., & Stark, R. (1994). *Religion and Society in Tension. Sociological Analysis* (Vol. 27).
- Rozmita, D., Yuniarti, R., & Jabbaar, M. (2015). Pengaruh Pelaksanaan Risk Based Internal Auditing Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 3 (3), 831–836.
- Said, J., Alam, M. M., Ramli, M., & Rafidi, M. (2017). Integrating ethical values into *fraud* triangle theory in assessing employee *fraud*. Evidence from the Malaysian banking industry. *Journal of International Studies*, 10 (2), 170–184.
- Setyadiharja, R. (2017). *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*. Yogyakarta: Deepublis.
- Surjandari, D. A., & Martaningtyas, I. (2015). An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture, on *Fraud* of Indonesia Government Officer. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6 (55), 71–81.
- Teo, T. S. H., Lin, S., & Lai, K. hung. (2009). Adopters and non-adopters of *E-Procurement* in Singapore: An empirical study. *Omega*, 37 (5), 972–987.
- Tika, P. (2008). *Budaya Organisasi dan Peningkata Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Turner, J. L., Mock, T. J., & Srivasta, R. P. (2003). An Analysis of the *Fraud* Triangle. Retrieved from <http://citeseerx.ist.psu.edu>

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Evaluasi Pengukuran (*Outer Model*)

1. Uji Validitas

Tabel 1. *Initial Item Loadings* dan AVE Akhir

Variabel	Item pernyataan	Kode	Loading	AVE
Pencegahan <i>Fraud</i> (PF)	Menolak penggunaan dokumen fotokopian	PF1	0,966	0,886
	Terdapat pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas	PF2	0,849	
	Menghindari praktik-praktik yang tidak lazim/mencurigakan	PF3	0,948	
	Ada larangan gaya hidup mewah	PF4	0,948	
	Ada rasa bersalah dan ketakutan	PF5	0,966	
	Menyediakan sarana pengaduan	PF6	0,962	
<i>E-Procurement</i> (EE)	Implementasi <i>E-Procurement</i> dapat mengurangi biaya	EE1	0,806	0,697
	Implementasi <i>E-Procurement</i> menyebabkan perubahan perilaku	EE2	0,836	
	Implementasi <i>E-Procurement</i> terjadi pergeseran hubungan, peningkatan pertukaran informasi antara panitia pengadaan dengan calon penyedia	EE3	0,857	
	Implementasi <i>E-Procurement</i> memudahkan dalam perencanaan dan pengendalian	EE4	0,895	
	Implementasi <i>E-Procurement</i> dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya	EE5	0,773	
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian	SPI1	0,884	0,806
	Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola	SPI2	0,907	
	Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan	SPI3	0,916	
	Penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan perbaikan	SPI4	0,876	
	Model penyampaian informasi kepada semua yang bertanggungjawab	SPI5	0,904	

Tabel 2. *Initial Item Loading dan AVE Akhir – Lanjutan*

Variabel	Item pernyataan	Kode	Loading	AVE
<i>E-Procurement</i> (EE)	Implementasi <i>E-Procurement</i> dapat mengurangi biaya	EE1	0,806	0,697
	Implementasi <i>E-Procurement</i> menyebabkan perubahan perilaku	EE2	0,836	
	Implementasi <i>E-Procurement</i> terjadi pergeseran hubungan, peningkatan pertukaran informasi antara panitia pengadaan dengan calon penyedia	EE3	0,857	
	Implementasi <i>E-Procurement</i> memudahkan dalam perencanaan dan pengendalian	EE4	0,895	
	Implementasi <i>E-Procurement</i> dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya	EE5	0,773	
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian	SPI1	0,884	0,806
	Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola	SPI2	0,907	
	Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan	SPI3	0,916	
	Penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan perbaikan	SPI4	0,876	
	Model penyampaian informasi kepada semua yang bertanggungjawab	SPI5	0,904	
Budaya Organisasi (BO)	Anggota organisasi didorong untuk lebih inovatif dan mampu mengambil risiko.	BO1	0,905	0,828
	Anggota organisasi diharapkan menunjukkan presisi, analisis, dan perhatian terhadap detail.	BO2	0,932	
	Organisasi berfokus pada hasil atau hasil daripada pada teknik	BO3	0,907	
	Keputusan manajemen mempertimbangkan dampaknya terhadap orang-orang dalam organisasi	BO4	0,899	
	Kegiatan kerja diatur sekitar tim bukan individu.	BO5	0,942	
	Anggota organisasi agresif dan kompetitif bukan santai	BO6	0,916	

Tabel 3. Initial Item *Loading* dan AVE Akhir – Lanjutan

Variabel	Item pernyataan	Kode	Loading	AVE
	Kegiatan organisasi menekankan mempertahankan status <i>quo</i> berbeda dengan pertumbuhan	BO7	0,864	
Etika Pegawai (EP)	Melaksanakan tugas dengan tertib	EP1	0,924	0,839
	Melaksanakan tugas secara profesional	EP2	0,905	
	Pegawai tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat	EP3	0,889	
	Pegawai menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan	EP4	0,952	
	Pegawai dituntut untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait	EP5	0,871	
	Pegawai tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima imbalan	EP6	0,943	
	Pegawai menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik	EP7	0,908	
Relegiusitas (RG)	Tingkat kepercayaan individu terhadap nilai-nilai agama	RG1	0,875	0,772
	Tingkat kepatuhan individu dalam melakukan ritual kegiatan seperti yang diperintahkan	RG2	0,881	
	Tingkat perasaan dan pengalaman religius individu	RG3	0,817	
	Tingkat pengetahuan dan pemahaman individu nilai agama mereka	RG4	0,784	
	Tingkat perilaku individu yang dimotivasi oleh mereka agama	RG5	0,885	

Lampiran 2 – Penilaian *Inner Model*

Tabel 4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	β (Beta)	R Square	T Statistics	Kesimpulan	Keterangan
H1	EE → PF	0,217		3,567	Signifikan	Sesuai Hipotesis
H2	SPI → PF	0,148		2,072	Signifikan	Sesuai Hipotesis
H3	BO → PF	0,272	0,957	2,885	Signifikan	Sesuai Hipotesis
H4	EP → PF	0,254		2,070	Signifikan	Sesuai Hipotesis
H5	RG → PF	0,158		2,213	Signifikan	Sesuai Hipotesis

Sumber: Data primer diolah, 2018

